



**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 85 TAHUN 2021**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021-2026**



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/MENPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sragen dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.
13. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2021-2026.
14. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Tujuan RPJMD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Tujuan Renstra PD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

17. Sasaran Strategis Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Sasaran Strategis Renstra PD adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemda Sragen dan PD dalam menyusun dokumen SAKIP
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemda Sragen dan PD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) IKU yang disusun PD harus sesuai dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (2) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.
 - b. IKU PD sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB III PENGUNAAN IKU

Pasal 6

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan PD sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan PD melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU guna melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, singkat dan jelas dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

BAB IV
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING,
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Guna kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan Bupati menugaskan Sekretaris Daerah atau PD yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 30 - 12 - 2021



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 30 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



ANTAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 85

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 85 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong

MISI : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan;

4. Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja;

5. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong Royong.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	4
<i>M1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia</i>				
T1.	Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan keluarga	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia, hal ini penting bagi perumus kebijakan dan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan di masa mendatang. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Pendapatan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ Dimana: X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = $2/3(\text{indeks melek huruf}) + 1/3(\text{indeks rata-rata lama sekolah})$ X(3) : Indeks standar hidup layak $\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(i)_{\min}}{X(i)_{\max} - X(i)_{\min}}$ Dimana: X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i) X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)</p> <p>Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Komponen IPM</p> <p>Angka Harapan Hidup Nilai Maksimum 85 Nilai Minimum 25 Angka Melek Huruf Nilai Maksimum 100 Angka Minimum 0 Rata-rata Lama Sekolah Nilai Maksimum 15 Nilai Minimum 0 Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996 Nilai Maksimum 732.720 Nilai Minimum 300.000</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman, Dinas Sosial</p> <p>Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen</p>

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	4
				<p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Penanggungjawab: Dinas Kesehatan Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen</p>
S1.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	<p>Alasan Pemilihan Indikator: IPG menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indikator ini dipilih untuk mengukur kesenjangan gender pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, mengingat IPG Kabupaten Sragen masih perlu ditingkatkan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: IPG diukur dengan cara membandingkan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata pendapatan antara Laki-laki dan Perempuan.</p> <p>Keterangan: Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Penanggungjawab: DPPKBPPPA, Bappeda Litbang, Bagian Hukum Setda Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen</p> <p>Predikat Kabupaten Layak Anak</p> <p>Predikat</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Sragen yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak, hal ini penting bagi perumus kebijakan dan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Kategori Penilaian: Tingkat Pratama, Tingkat Madya, Tingkat Nindya, Tingkat Utama dan Kabupaten Layak Anak</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Penanggungjawab: DPPKBPPPA, Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda</p> <p>Sumber Data: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)</p>

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	4
M2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.				
T.2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Indeks	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Sragen. Implementasi reformasi birokrasi meliputi 8 area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, deregulasi kebijakan, akuntabilitas kinerja, penataan SDM, pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)</p> <p>Kategori penilaian</p> <p>Predikat AA dengan Nilai > 90 - 100 (Istimewa)</p> <p>Predikat A dengan Nilai > 80 - 90 (Sangat Baik)</p> <p>Predikat BB dengan Nilai > 70 - 80 (Baik)</p> <p>Predikat A dengan Nilai > 60 - 70 (Cukup Baik)</p> <p>Predikat CC dengan Nilai > 50 - 60 (Cukup)</p> <p>Predikat C dengan Nilai > 30 - 50 (Buruk)</p> <p>Predikat D dengan Nilai 0 - 30 (Sangat Buruk)</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah</p> <p>Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)</p>
S2.1	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat SAKIP)	Predikat /Nilai	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Sragen. Komponen SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di tingkat pemerintah kabupaten dan perangkat daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)</p> <p>Keterangan:</p> <p>Predikat AA dengan Nilai > 90 - 100 (Sangat Memuaskan)</p> <p>Predikat A dengan Nilai > 80 - 90 (Memuaskan)</p> <p>Predikat BB dengan Nilai > 70 - 80 (Sangat Baik)</p> <p>Predikat A dengan Nilai > 60 - 70 (Baik)</p> <p>Predikat CC dengan Nilai > 50 - 60 (Cukup Memadai)</p> <p>Predikat C dengan Nilai > 30 - 50 (Kurang)</p> <p>Predikat D dengan Nilai > 0 - 30 (Sangat Kurang)</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda Litbang dan Semua Perangkat Daerah</p> <p>Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)</p>

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	4
S2.2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknolog	Indeks SPBE	Indeks	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Kabupaten Sragen.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)</p> <p>Keterangan: Struktur penilaian dalam evaluasi SPBE terdiri dari Domain(area pelaksanaan SPBE yang dinilai), Aspek (area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai) dan Indikator (informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai)</p> <p>Kelompok predikat indeks SPBE: Predikat Memuaskan dengan Nilai Indeks 4,2 - 5 Predikat Sangat Baik dengan Nilai 3,5 - < 4,2 Predikat Baik dengan Nilai 2,6 - < 3,5 Predikat Cukup dengan Nilai 1,8 - < 2,6 Predikat Kurang dengan Nilai < 1,8</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Semua Perangkat Daerah</p> <p>Sumber Data: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)</p>
M3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan				
T3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen mengingat Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator yang selalu dipakai dalam mengukur keberhasilan pembangunan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $PDBi = PDBo (1+R)^t$</p> <p>Keterangan: PDB(t) = Produk domestik bruto periode t PDB(o) « Produk domestik bruto periode awal r = Tingkat pertumbuhan t = Jarak periode</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bappeda Litbang, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kop UMKM dan Perindag, Bagian Perekonomian Setda</p> <p>Sumber Data BPS Kabupaten Sragen</p>

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	4
S3.1	Meningkatnya pendapatan perkapita	Pendapatan Per Kapita	Rp.Juta/ Tahun	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Sragen, dengan adanya data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{PDRB}}{\text{JUMLAH PENDUDUK}} \times 100 \%$</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bappeda Litbang, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UMKM dan Perindag, Bagian Perekonomian Setda</p> <p>Sumber Data BPS Kabupaten Sragen</p>
S3.2	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	Trilyun Rp	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat capaian realisasi penanaman modal per tahun yang diterima Kabupaten Sragen, hal ini penting bagi perumus kebijakan dan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan di masa mendatang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Menghitung jumlah realisasi penanaman modal dalam satu tahun di Kabupaten Sragen</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: DPMPTSP, Bappeda Litbang, Bagian Perekonomian Setda</p> <p>Sumber Data: DPMPTSP</p>
S3.3	Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberagaman konsumsi kelompok bahan pangan, dengan adanya data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\text{PPH} = \text{Skor PPH Kelompok padi-padian} + \text{umbi-umbian} + \dots + \text{Skor PPH kelompok lainnya}$</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bappeda Litbang, Bagian Perekonomian Setda</p> <p>Sumber Data: Dinas Pertanian, Bappeda Litbang, Bagian Perekonomian Setda</p>

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	4
<i>M4: Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja</i>				
T4	Menurunkan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja	Angka Kemiskinan	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan berpengaruh terhadap menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Sragen, dengan adanya data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Yi}{Z} \right]$ Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (proverty gap) Z = garis kemiskinan q = jumlah penduduk miskin Yi = pendapatan individu penduduk miskin n = jumlah penduduk</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Komulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bappeda Litbang, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda</p> <p>Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen</p>
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Kabupaten Sragen prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{JUMLAH PENGANGGURAN}}{\text{JUMLAH ANGKATAN KERJA}} \times 100 \%$</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Komulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bappeda Litbang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Kesra Setda</p> <p>Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen</p>
S4.1	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penurunan Angka Kemiskinan	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan kemiskinan, mengingat pembangunan di Kabupaten Sragen prioritasnya diarahkan pada penurunan angka kemiskinan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Angka Kemiskinan Tahun n) - (Angka Kemiskinan Tahun n-1)</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Komulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bappeda Litbang, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda</p> <p>Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen</p>

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	4
S4.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada tingkat partisipasi angkatan kerja, mengingat pembangunan di Kabupaten Sragen prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN KERJA USIA 15 TAHUN KETAS}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA}} \times 100 \%$</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bappeda Litbang, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda</p> <p>Sumber Data: BPS Kabupaten Sragen</p>
M 5. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong Royong				
T5	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur berwawasan lingkungan	Indeks	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja</p> <p>Formulasi Pengukuran: (70% X INDEKS INFRASTRUKTUR) + (30% X IKLH)</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bappeda Litbang, DPU, Dishub, Dinaas LH, Disperkim</p> <p>Sumber Data: Bappeda Litbang</p>
S5.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja</p> <p>Formulasi Pengukuran: (70% X INDEKS BINA MARGA SDA) + (15% X INDEKS KECIPTAKARYAAN) + (5% X INDEKS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG) + (10% X INDEKS PELAYANAAN TRANSPORTASI)</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bappeda Litbang, DPU, Dishub, Dinaas LH, Disperkim</p> <p>Sumber Data: Bappeda Litbang</p>

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	4
S5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, mengingat kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.</p> <p>Formulasi Pengukuran: 30% IKU + 30% IKA + 40% IKTL</p> <p>Keterangan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dari komponen Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Ketutupan Lahan</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Penanggungjawab: Bappeda Litbang, Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan</p> <p>Sumber Data: Bappeda Litbang</p>



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 85 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH

Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- Fungsi :
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	1 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi sesuai dengan misi kedua Bupati Sragen tahun 2021-2026</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah IKU perangkat daerah yang tercapai targetnya dibagi Jumlah seluruh IKU perangkat daerah) X 100%.</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Hasil pengukuran capaian kinerja dalam LKJiP Tahun n-1 Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen</p>
1.1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang dievaluasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi asisten pemerintahan dan Kesra</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang tercapai targetnya dibagi jumlah seluruh IKU PD di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra) X 100 %</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Hasil pengukuran capaian kinerja dalam LKJiP Tahun n-1 Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
		2. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dievaluasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang tercapai targetnya dibagi jumlah seluruh IKU PD di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan) X 100%</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Hasil pengukuran capaian kinerja dalam LKJiP Tahun n-1 Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p>
		3. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang dievaluasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang tercapai targetnya dibagi jumlah seluruh IKU PD di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum) X 100 %</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Hasil pengukuran capaian kinerja dalam LKJiP Tahun n-1 Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN

Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten;
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.	1 Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan Formulasi Pengukuran: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun berjalan Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Sekretariat Dewan
1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.	1 Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan Formulasi Pengukuran: Persentase jumlah kegiatan yang diusulkan oleh DPRD dengan kegiatan yang sudah terealisasi dengan ketepatan jadwal yang sesuai dengan target yang ditetapkan Tipe Penghitungan: Kumulatif Sumber Data: Sekretariat Dewan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT

Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	1. Maturitas SPIP	Alasan Pemilihan Indikator : Karena Belum optimalkan sistem pengendalian di Perangkat Daerah Formulasi Pengukuran: (Formulasi Penilaian Dari BPKP) Tipe Penghitungan: Tabel/Nilai perhitungan dari BPKP Sumber Data: Hasil penyelenggaraan SPIP Tiap Tahun Di Kabupaten
1.1	Meningkatnya fungsi pengawasan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	1. Kapabilitas APIP 2. Manajemen Risiko (MRI) 3. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Alasan Pemilihan Indikator : Tiap Tahun ada penilaian Baseline dari BPKP Formulasi Pengukuran: (Formulasi Penilaian Dari BPKP) Tipe Penghitungan: Tabel Nilai Sumber Data: Hasil penyelenggaraan Kapabilitas APIP, MRI, IEPK Dikab Sragen

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Sragen dalam menyediakan peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia.</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $HLS = \sum_{i=7}^k \frac{Ei}{Pi}$ <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Data BPS Kab. Sragen</p>
		2. Rata-rata lama sekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dibidang pendidikan Kabupaten Sragen dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat (penduduk) Kabupaten Sragen menyelesaikan jenjang tahun pendidikan sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia.</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n xi$ <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Data BPS Kab. Sragen</p>
1.1	Melestarikan kebudayaan Sragen	1. Cakupan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Sejarah dan Cagar Budaya	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini untuk mengevaluasi peran serta upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Sejarah dan Cagar Budaya.</p> <p>Formulasi Pengukuran : (((Jumlah OPK yang dilestarikan dibagi total data awal OPK) X 100%) + ((Jumlah sejarah yang dilestarikan dibagi total data awal sejarah)x100%) + ((Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi total data awal cagar budaya)x100%);</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Sistem Informasi Cagar Budaya (SISCA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
3.	Sasaran : Tercapainya SPM Bidang Pendidikan	1. Capaian SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk melakukan evaluasi atas kinerja pelayanan dasar pendidikan Jenjang PAUD pada masyarakat/penduduk Kabupaten Sragen terpenuhi.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah siswa TK/RA umur 5 - 6 Tahun dibanding Jumlah Penduduk umur 5 - 6 Tahun x 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data profil pendidikan, Data Dapodik, Data Penduduk Dukcapil, Data EMIS</p>
		2. Capaian SPM Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk melakukan evaluasi atas kinerja pelayanan dasar pendidikan Jenjang Sekolah Dasar pada masyarakat/penduduk Kabupaten Sragen terpenuhi.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah siswa SD/MI umur 7 - 12 Tahun dibanding Jumlah Penduduk umur 7 - 12 Tahun x 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data profil pendidikan, Data Dapodik, Data Penduduk Dukcapil, Data EMIS</p>
		3. Capaian SPM Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk melakukan evaluasi atas kinerja pelayanan dasar pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama pada masyarakat/penduduk Kabupaten Sragen terpenuhi.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah siswa SMP/MTs umur 13 - 15 Tahun dibanding Jumlah Penduduk umur 13 - 15 Tahun x 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data profil pendidikan, Data Dapodik, Data Penduduk Dukcapil, Data EMIS</p>
		4. Capaian SPM Bidang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk melakukan evaluasi atas kinerja pelayanan dasar pendidikan Non Formal/Kesetaraan pada masyarakat/penduduk Kabupaten Sragen terpenuhi.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah siswa Pendidikan Non Formal/Kesetaraan umur 7 - 18 Tahun dibanding Jumlah Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah umur 7 - 18 Tahun x 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data profil pendidikan, Data Dapodik, Data Penduduk Dukcapil</p>
4.	Sasaran: Meningkatkan satuan Pendidikan dengan Akreditasi A	1. Persentase Satuan Pendidikan PAUD Akreditasi A	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui gambaran kinerja pendidikan PAUD dan PNF sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah lembaga PAUD yg terakreditasi A dibagi jumlah lembaga PAUD x 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Paud dan PNF Prop. Jateng</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
		2. Persentase Satuan Pendidikan SD Akreditasi A	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui gambaran kinerja pendidikan SD sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah lembaga SD yg terakreditasi A dibagi jumlah lembaga SD x 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah Prop. Jateng</p>
		3. Persentase Satuan Pendidikan SMP Akreditasi A	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui gambaran kinerja pendidikan SMP sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah lembaga SMP yg terakreditasi A dibagi jumlah lembaga SMP x 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah Prop. Jateng</p>
		4. Persentase Satuan Pendidikan PNF Akreditasi A	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui gambaran kinerja pendidikan Non Formal/Kesetaraan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah lembaga PNF/Kesetaraan yg terakreditasi A dibagi jumlah lembaga PNF/Kesetaraan x 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Badan Akreditasi Nasional Paud dan PNF Prop. Jateng</p>
5.	Sasaran: Meningkatnya kebudayaan yang dilestarikan	1. Persentase temuan Obyek yang diduga cagar budaya yang dilestarikan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini untuk mengevaluasi peran serta upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pelestarian Obyek yang diduga cagar budaya (ODCB).</p> <p>Formulasi Pengukuran : ((Jumlah Temuan ODCB Yang Dilindungi + Data Baru n Tahun) Dibagi (Jumlah Total ODCB Yang Terdata + Total Target)) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Sistem Informasi Cagar Budaya (SISCA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen</p>
		2. Persentase kebudayaan yang dilestarikan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengevaluasi peran serta upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).</p> <p>Formulasi Pengukuran : ((Jumlah Data Awal OPK Yang Dilestarikan +Data Baru N Tahun) Dibagi (Jumlah Data Awal OPK Yang Dilestarikan + Total Target)) x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Data Sistem Informasi Cagar Budaya (SISCA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
		3. Persentase sejarah yang dilestarikan	<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Indikator ini untuk mengevaluasi peran serta upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pelestarian Sejarah.</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>((Jumlah Sejarah Yang Dilestarikan) Dibagi (Jumlah Data Awal Sejarah Tahun))x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan :</p> <p>Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Data Sistem Informasi Cagar Budaya (SISCA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusaan Bidang Kesehatan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Kesehatan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Formulasi Pengukuran : Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sragen Alasan Pemilihan Indikator:
2.	Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, merata dan terjangkau	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, merata dan terjangkau. Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{indikator SPM yang mencapai 100\%}}{\sum \text{semua indikator SPM}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum yang
Fungsi : a. Perumusaan Bidang Pekerjaan Umum;
b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pekerjaan Umum;
d. Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Pekerjaan Umum;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1	Meningkatkan infrastruktur pekerjaan umum	1 Indeks infrastruktur pekerjaan umum	<p>Alasan pemilihan indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar indeks infrastruktur pekerjaan umum, sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan. Formulasi pengukuran: $\frac{\text{Indeks infrastruktur Bina Marga} + \text{Indeks infrastruktur SDA} + \text{Indeks Keciptakaryaannya}}{3}$ Tipe perhitungan: Komulatif Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kab.Sragen</p>
1.1.	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	1 Indeks infrastruktur bina marga dan SDA	<p>Alasan pemilihan indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi indeks infrastruktur Bina Marga dan SDA, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Formulasi pengukuran: $\frac{\text{Indeks infrastruktur Bina Marga} + \text{Indeks infrastruktur SDA}}{2}$ Tipe perhitungan: Komulatif Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kab.Sragen</p>
		2 Indeks Keciptakaryaannya	<p>Alasan pemilihan indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi indeks keciptakaryaannya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambila kebijakan di bidang Cipta Karya. Formulasi pengukuran: $\frac{\text{Rata-Rata \% Capaian Program Keciptakaryaannya}}{100\%}$ Tipe perhitungan: Komulatif Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kab.Sragen</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pengelolaan Ruang sesuai dengan NSPK yang berlaku	1. Indeks Kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya menghitung kesesuaian pemanfaatan ruang dari jumlah sampel monitoring evaluasi.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang}}{\text{Jumlah Sampel Monev}}$ <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen</p>
1.1	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	1. Indeks penyelenggaraan pemanfaatan ruang	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya meningkat, mengingat penataan ruang harus dilakukan sejak awal agar tidak terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{(\text{index Perencanaan Tata Ruang} + \text{Index Kepatuhan Pemanfaatan Ruang})}{2}$ <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen</p>
2.	Meningkatkan standar kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Indeks Kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman tentang keberhasilan peningkatan rumah layak huni dan peningkatan luas kawasan kumuh perkotaan yang dapat ditangani.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Persentase Rumah Layak Huni} + \text{Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang ditangani}}{2}$ <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
2.1	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak huni dan Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang tertangani	1. Persentase Rumah Layak Huni	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak peningkatan jumlah Rumah Layak huni di Kabupaten Sragen</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen</p>
		2. Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang ditangani	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan luas kawasan kumuh perkotaan yang dapat ditangani</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang tertangani}}{\text{Jumlah Luas Permukiman Kawasan Kumuh Perkotaan}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen</p>
3.	Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pertahanan serta	1 Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penyelenggaraan pertanahan yang meliputi penyelesaian sengketa, penyelesaian ganti rugi, redidtribusi tanah dan penatagunaan tanah</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Indeks Penyelesaian Sengketa} + \text{Indeks Penyelesaian Ganti Rugi} + \text{Indeks Redistribusi Tanah} + \text{Indeks Penatagunaan Tanah}}{4}$ <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen</p>
3.1	Terpenuhinya Pelayanan Bidang Pertanahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten	1 Persentase capaian Pelayanan Bidang Pertanahan kewenangan Kabupaten	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penanganan mediasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, pendataan aset tanah dan penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Persentase sengketa dan konflik Pertanahan yang tertangani} + \text{Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan} + \text{Persentase Jumlah titik Aset Tanah yang Terdata} + \text{Persentase Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria}}{4}$ <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Tujuan Strategis: Memberdayakan Koperasi dalam Rangka Pengembangan UMKM	1. Persentase Koperasi Sehat	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya memberdayakan Koperasi dalam rangka pengembangan UMKM yang merupakan pendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Jumlah koperasi sehat tahun } n}{\text{Jumlah koperasi aktif tahun } n} \times 100\%$ <p>• Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>• Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>
		2. Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Mikro	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya memberdayakan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan UMKM yang merupakan pendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang dibina untuk peningkatan aset dan omsetnya di tahun } n}{\text{Jumlah total usaha mikro di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>
1.1	Sasaran Strategis: Meningkatkan Peran Koperasi Dalam Perekonomian	1. Persentase Koperasi Aktif	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya memberdayakan Koperasi dalam rangka pengembangan UMKM yang merupakan pendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $\frac{\text{Jumlah koperasi aktif tahun } n}{\text{Jumlah total koperasi di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ <p>Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1.2	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	1. Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Aset Dan Omset	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya memberdayakan Usaha Mikro dalam rangka pengembangan UMKM yang merupakan pendukung tujuan pembangunan tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah usaha mikro yang dibina untuk peningkatan aset dan omsetnya di tahun n ----- x 100% Jumlah total usaha mikro di Kabupaten Sragen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>
2.	Tujuan Strategis: Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mendorong daya saing produk unggulan daerah	1. Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Sragen yang merupakan pendukung misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun (n) – Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun (n – 1)) ----- x 100% Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun (n – 1)</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)</p>
2.1	Sasaran Strategis: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1. Persentase sarpras perdagangan dalam kondisi baik	<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya meningkatkan sarpras perdagangan dalam kondisi baik yang merupakan pendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah sarpras perdagangan dalam kondisi baik di tahun n ----- x 100% Jumlah sarpras perdagangan di tahun n</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>
		2. Persentase Tingkat Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting yang merupakan pendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah komoditas stabil sesuai CV (Coefisien Variatif) di tahun n ----- x 100% Jumlah komoditas yang dipantau di tahun n</p> <p>Tipe Penghitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
		3. Persentase IKM/UMKM Pelaku Ekspor	<p>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan IKM/UMKM pelaku ekspor yang merupakan pendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2021 - 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah IKM/UMKM pelaku ekspor di tahun } n}{\text{Jumlah IKM/UMKM potensial ekspor di tahun } n} \times 100\%$ </p> <p>Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>
3.	Tujuan Strategis: Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	1. Persentase pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi sektor perindustrian pada PDRB Kabupaten Sragen yang merupakan pendukung misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2021 - 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun } (n) - \text{Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun } (n - 1)}{\text{Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun } (n - 1)} \times 100\%$ </p> <p>Tipe Penghitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)</p>
3.1	Sasaran Strategis: Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1. Persentase pertumbuhan industri	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan industri yang merupakan pendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2021 - 2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah industri di tahun } (n) - \text{Jumlah industri di tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah industri di tahun } (n - 1)} \times 100\%$ </p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) miskin yang ditangani	Persentase meningkatnya keberdayaan PPKS	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya mendukung penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen.</p> <p>· Formulasi Pengukuran: Jumlah PPKS Miskin yang ditangani Jumlah Total PPKS Miskin Terdata x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Sosial - SIM-Saraswawati dari UPT-PK - Aplikasi SIKS - DJ dari Provinsi Jawa Tengah - Aplikasi SIKS - NG dari Kementerian Sosial</p>
2.	Meningkatnya keberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	<p>Alasan Pemilihan Indikator: - Pelaksanaan dasar Bidang Sosial adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Dinas Sosial adalah pelayanan wajib dasar di Bidang Sosial. - UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa pelayanan di Dinas Sosial adalah PPKS (26 jenis PPKS termasuk fakir miskin).</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah PPKS yang ditangani Jumlah Total PPKS Terdata x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Sosial SIM-Saraswawati dari UPT-PK Aplikasi SIKS - DJ dari Provinsi Jawa Tengah</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, dan bidang pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, dan bidang pangan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, dan bidang pangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, dan bidang pangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pola Pangan Harapan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Untuk mengevaluasi kinerja dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam upaya mendukung misi keempat bupati yaitu Penanganan Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Ketahanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung program ketahanan pangan nasional - Relevan dengan RPJMD Kabupaten - Skor PPH masuk dalam dalam indikator rencana aksi SDG'S - Skor PPH merupakan skor yang dapat diperbandingkan secara nasional - Skor PPH menggambarkan keberagaman konsumsi pangan setempat <p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>Skor dinilai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.</p> <p>Tipe Perhitungan:</p> <p>Kumulatif</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</p>
2.	Meningkatnya kemandirian dan diversifikasi pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat.	1. Angka Kecukupan Protein (AKP) gram/kap/hari	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel untuk penghitungan skor PPH - Menggambarkan konsumsi energi berdasarkan kelompok pangan masyarakat setempat <p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>Konsumsi protein dari setiap kelompok pangan (Gram/kap/hari)</p> <p>Tipe Perhitungan:</p> <p>Kumulatif</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel untuk penghitungan skor PPH - Menggambarkan konsumsi protein masyarakat setempat <p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>Konsumsi energi dari setiap kelompok pangan (kkal/kap/hari)</p> <p>Tipe Perhitungan:</p> <p>Kumulatif</p> <p>Sumber Data:</p> <p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
		2. Angka Kecukupan Energi (AKE) kkal/kap/hari	<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel untuk penghitungan skor PPH - Menggambarkan konsumsi protein masyarakat setempat <p>Formulasi Pengukuran: Konsumsi energi dari setiap kelompok pangan (kkal/kap/hari)</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p>
3.	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian	1. Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian (%)	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengevaluasi kinerja dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam upaya mendukung misi ketiga bupati yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi yang didukung dengan pelayanan publik berbasis teknologi dimana pertanian merupakan salah satu sektor unggulan - Relevan dengan RPJMD Kabupaten - Produksi digunakan sebagai data pertanian utama skala nasional - Produksi tanaman pertanian dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan surplus maupun defisit suatu daerah <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{persentase peningkatan produksi tanaman pangan} + \text{persentase peningkatan produksi tanaman horti} + \text{persentase peningkatan produksi perkebunan}}{3}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p>
4	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Rata rata peningkatan produksi tanaman pangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Mendukung program kementerian pertanian Relevan dengan RPJMD Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah produksi tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai)} - \text{jumlah produksi tahun dasar}}{\text{Jumlah produksi tahun tahun dasar}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p>
		2. Rata rata peningkatan produksi tanaman hortikultura	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung program kementerian pertanian - Relevan dengan RPJMD Kabupaten <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah produksi tanaman hortikultura (bawang merah, cabe besar)} - \text{jumlah produksi tahun dasar}}{\text{Jumlah produksi tahun tahun dasar}}$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
		3. Rata rata peningkatan produksi tanaman perkebunan	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <p>Mendukung program kementerian pertanian Relevan dengan RPJMD Kabupaten</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi tanaman perkebunan (tebu) - jumlah produksi tahun dasar</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- Perumusan kebijakan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
 - Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
 - Pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian, bidang kelautan dan perikanan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan dan Peternakan	Persentase peningkatan nilai sektor perikanan dan peternakan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan produksi perikanan dan peternakan mengingat komoditas tersebut merupakan pendukung Misi 3 (tiga) Bupati Sragen Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan</p> <p>Formulasi Pengukuran : (Rata-rata peningkatan produksi perikanan + rata-rata peningkatan produksi peternakan) / 2</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen</p>
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan Sasaran Misi 3 (tiga) Bupati Sragen Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan</p> <p>Formulasi Pengukuran : (Peningkatan produksi perikanan tangkap + peningkatan produksi perikanan budidaya) / 2</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
3.	Meningkatkan Produksi Daging	Persentase peningkatan produksi daging	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan produksi daging untuk mendukung ketahanan pangan dan Sasaran Misi 3 (tiga) Bupati Sragen Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan</p> <p>Formulasi Pengukuran : (Peningkatan produksi daging sapi + Peningkatan produksi daging kambing/domba + peningkatan produksi unggas) /3</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan	Indeks Pelayanan Transportasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam pelayanan transportasi di kabupaten Sragen, mengingat Pelayanan Transportasi merupakan bagian dari kebutuhan vital akan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Total Sarana Prasarana perhubungan di Kab Sragen}}{\sum \text{Total kebutuhan Sarana Prasarana Perhubungan di Kab Sragen}}$ </p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Permenhub RI No.PM 2 Tahun 2013</p>
2.	Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik.	% Sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik.	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik di kabupaten Sragen, mengingat Pelayanan Transportasi adalah salah satu factor yang mendukung keselamatan Perhubungan.</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Sarpras Perhubungan yang ada dalam kondisi baik}}{\sum \text{Total Sarpras Perhubungan di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ </p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Permenhub RI No.PM 2 Tahun 2013</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kepemilikan dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kepemilikan dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan pendukung Misi kedua pembangunan Daerah Kabupaten Sragen “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.</p>
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Persentase penduduk yang memiliki dokumen Administrasi</p> <p>Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepemilikan KTP-Elektronik; 2) Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak); 3) Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk 	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam upaya meningkatnya kepemilikan dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan pendukung Misi kedua pembangunan daerah Kabupaten Sragen “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Persentase Kepemilikan KTP Elektronik} + \text{Persentase Kepemilikan KIA} + \text{Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk}}{3}$ </p> <p>1. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk: $\frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ </p> <p>2. Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak): $\frac{\text{Jumlah anak memiliki KIA}}{\text{Jumlah penduduk usia kurang dari 17 tahun}} \times 100\%$ </p> <p>3. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk: $\frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ </p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang berbasis elektronik serta menjamin keterbukaan informasi serta tersedianya data statistik yang akurat kepada masyarakat	1. Indeks SPBE	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sragen guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari Kemenpan RB yang meliputi evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kemenpan RB</p>
		2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sragen guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat dengan indikator penilaian yaitu mengumumkan dan menyediakan informasi publik, melayani dan mengelola informasi publik.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Komisi Informasi Pusat</p>
2.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan berbasis elektronik serta tersedianya data statistik yang akurat	1. Indeks Domain Tata Kelola SPBE	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Tata Kelola SPBE di Kabupaten Sragen sebagai salah satu komponen dalam penilaian Indeks SPBE</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari Kemenpan RB yang meliputi evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kemenpan RB</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
		2. Indeks Domain Manajemen SPBE	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Manajemen SPBE di Kabupaten Sragen sebagai salah satu komponen dalam penilaian Indeks SPBE</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari Kemenpan RB yang meliputi evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kemenpan RB</p>
		3. Prosentase penyediaan data pada aplikasi sragen satu data	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian ketersediaan data pada aplikasi Sragen Satu Data</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{data yang disediakan}}{\text{data yang seharusnya tersedia}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
		4. Indeks Kematangan Keamanan Informasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kematangan keamanan informasi pada jaringan online Kabupaten Sragen</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Audit keamanan informasi yang dilakukan oleh BSSN atau pihak ketiga.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BSSN atau Pihak ketiga</p>
3.	Meningkatnya Badan Publik yang informatif	1. Prosentase Jumlah Badan Publik yang informatif	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian badan publik di Kabupaten Sragen yang informatif</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{jumlah badan publik yang informatif}}{\text{jumlah badan publik yang ada}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan daya saing dibidang olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> · Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan · Formulasi Pengukuran: Jumlah perolehan medali tahun (n) · Tipe Perhitungan: Non Kumulatif · Sumber Data: Dispora KONI
2.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> · Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kemandirian pemuda · Formulasi Pengukuran: Jumlah pemuda berprestasi dibagi jumlah peserta kegiatan kepemudaan dikalikan seratus persen · Tipe Perhitungan: Non Kumulatif · Sumber Data: Dispora
3.	Meningkatnya daya saing olahraga	Persentase atlet berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> · Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kemandirian pemuda · Formulasi Pengukuran: Jumlah atlet berprestasi dibagi jumlah atlet dikalikan seratus persen · Tipe Perhitungan: Non Kumulatif · Sumber Data: Dispora KONI
4.	Meningkatkan peran sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	<ul style="list-style-type: none"> · Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur peningkatan olahraga atlet Kabupaten Sragen ditingkat provinsi dan nasional · Formulasi Pengukuran: Jumlah PAD pariwisata dibagi Jumlah PAD keseluruhan dikali seratus persen · Tipe Perhitungan: Non Kumulatif · Sumber Data: Dispora, BPKPD

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
5.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> · Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan jumlah kunjungan wisata ke obyek wisata Kabupaten Sragen · Formulasi Pengukuran: Jumlah kunjungan wisatawan tahun (n) dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun (n-1) dibagi jumlah · Tipe Perhitungan: Non Kumulatif · Sumber Data: Dispora
6.	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> · Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur peningkatan olahraga atlet Kabupaten Sragen ditingkat provinsi dan nasional · Formulasi Pengukuran: Jumlah PAD pariwisata dibagi Jumlah PAD keseluruhan · Tipe Perhitungan: Non Kumulatif · Sumber Data: Dispora, BAPPEDA LITBANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, dan bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, dan bidang energi sumber daya mineral;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, dan bidang energi sumber daya mineral;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, dan bidang energi sumber daya mineral;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, dan bidang energi sumber daya mineral; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di sragen prioritasnya diarahkan pada sasaran RPJMD menurunkan angka pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja > 15 Tahun</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah Angkatan Kerja dibagi jumlah penduduk 15 th ke atas X 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen BPS</p>
2.	Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja yang siap kerja	Tingkat produktifitas Tenaga Kerja (Rp/Perkapita)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam dengan memperhatikan nilai capaian pengukuran produktifitas Tenaga Kerja yang dapat menginterpretasikan peningkatan kualitas tenaga kerja baik secara kompetensi dan produktifitas tenaga kerja</p> <p>Formulasi Pengukuran: Pendapatan domestik Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk bekerja x 100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen BPS</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui tingkat kualitas lingkungan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang merupakan pendukung misi ke-5 Bupati yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan</p> <p>Formulasi Pengukuran: $IKLH = (0,3 \times IKA) + (0,3 \times IKU) + (0,4 \times IKTL)$</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Analisa Lapangan</p>
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui tingkat kualitas air untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan pendukung misi ke-5 Bupati yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Indeks Kualitas Air = $0,3 \times IKA$ (IKA dihitung oleh konsultan)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Analisa Lapangan</p>
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui tingkat kualitas udara untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang merupakan pendukung misi ke-5 Bupati yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Indeks Kualitas Udara = $0,3 \times IKU$ (IKU dihitung oleh konsultan)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Analisa Lapangan</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui tingkat tutupan lahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan pendukung misi ke-5 Bupati yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 0,4 x IKTL (IKTL dihitung oleh konsultan)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Analisa Lapangan</p>
		4. Pengelolaan Sampah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengelolaan Sampah merupakan salah satu indikator dalam program Adipura khususnya dalam capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah yang merupakan pendukung misi ke-5 Bupati yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan</p> <p>Formulasi Pengukuran: : Pengelolaan Sampah = ((Jumlah sampah tertangani/volume timbulan sampah) x 100 %) + ((Jumlah sampah terkurangi/volume timbulan sampah) x 100 %)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Analisa Lapangan</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1 Nilai realisasi penanaman modal (trilyun rupiah)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah .</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai investasi dalam tahun berjalan.</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal</p>
2.	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1 Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/investor)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam peningkatan iklim usaha yang berdaya saing dan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, yang mendukung peningkatan jumlah PMA/ PMDN (investor).</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah PMA/ PMDN (penanam modal/ investor) dalam tahun berjalan.</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Pengolahan data sistem informasi perizinan dan penanaman modal</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan IKU Bupati Formulasi Pengukuran: Hasil Penilaian Kemendes tahun (n)+2 Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Penilaian kemendes
2.	Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengetahui tingkat kemandirian desa dalam pembangunan desa, karena desa merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan tingkat paling bawah Formulasi Pengukuran: <u>Jumlah Desa Mandiri Tahun (n) + 2</u> Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Penilaian kemendes
3.	Jumlah Desa dengan predikat "Wasana Tata Praja Desa"	Hasil Penilaian penyelenggaraan pemerintahan desa tahun (n)	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan desa. Formulasi Pengukuran: Jumlah Desa Dengan Predikat WTP Desa Tahun (n) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PPKB DAN PPPA

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memberikan manfaat pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $IPG = \frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-Laki}} \times 100 \%$</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: BPS Sragen</p>
2.	Meningkatkan Kualitas Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Angka Harapan Hidup Perempuan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkelanjutan sebagai penompang faktor penentu kelangsungan hidup generasi berikutnya.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Idealnya Angka Harapan Hidup Perempuan dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: BPS Sragen</p>
		2. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk meningkatkan kecerdasan intelektual perempuan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama Sekolah Perempuan ke } - i)$</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P_{15+} = Jumlah Penduduk Perempuan berusia 15 tahun ke atas 2. Lama sekolah penduduk ke-i: <ul style="list-style-type: none"> > Tidak pernah sekolah = 0 > Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 > Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 > Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir > Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir <p style="text-align: center;">-1</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
			<p>1. Tahun konversi ijazah</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tidak punya ijazah = 0 > SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun > D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; <p>S1 = 17 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> > S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: BPS Sragen</p>
		3. Pengeluaran Perkapita Perempuan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk meningkatkan ekonomi perempuan.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$ $Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100$ <p>Y** = pengeluaran per kapita perempuan yang disesuaikan Y* = Pengeluaran per kapita perempuan harga konstan Y = pengeluaran per kapita perempuan setahun IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: BPS Sragen</p>
		4. Predikat Kabupaten Layak Anak	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk melaksanakan amanah undang-undang perlindungan anak dan peraturan daerah kabupaten layak anak dan SK Tim Gugus Tugas KLA.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian mandiri - Observasi Lapangan <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: Kementerian PPPA</p>
3.	Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan pengendalian jumlah penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk memantau jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sragen.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Selisih jumlah penduduk tahun ini dengan tahun yang lalu dibagi jumlah penduduk tahun ini</p> $LPP = \frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun ini} - \text{Jumlah Penduduk Tahun lalu}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun ini}} \times 100 \%$ <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: BPS Sragen</p>
4.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	1. Total Fertility Rate (TFR)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran:</p> $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i f} \times K$ <p>Keterangan :</p> <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i= 2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan kontanta biasanya 1000 Tipe Perhitungan: Komulatif Sumber Data: BPS dan BKKBN Provinsi</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen dalam menjaga ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum serta penegakan Perda yang merupakan upaya pendukung mewujudkan sasaran Pemerintah Kabupaten Sragen, yaitu meningkatnya keamanan, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah pelanggaran gangguan tibus data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Satpol PP Kab. Sragen</p>
2	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	Tingkat Pelayanan Penanganan Kebakaran	<p>Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam pelayanan penanganan kebakaran dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah kejadian kebakaran yang dilayani dibagi jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Satpol PP Kab. Sragen</p>
3.		Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk menilai sejauh mana kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen dalam memberikan pelayanan di bidang ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum, khususnya yang terkena dampak akibat Penegakan Perda/Perkada</p> <p>Formulasi Pengukuran : Jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibus akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda/Perkada Kab/kota serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik dibagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibus akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan Perkada dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Satpol PP Kab. Sragen</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
		Persentase penurunan pelanggaran Perda/ Perkada	<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>Untuk menilai sejauh mana kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen dalam menekan / mengurangi jumlah pelanggaran Perda/Perkada di wilayah Kabupaten Sragen.</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah pelanggaran Perda/Perkada data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan :</p> <p>Kumulatif</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Satpol PP Kab. Sragen</p>
4.	Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	<p>Alasan Pemilihan Indikator :</p> <p>untuk mengevaluasi seberapa cepat kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen dalam memberikan pelayanan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Sragen, sesuai dengan target waktu yang ditentukan.</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun N dalam tingkat waktu tanggap (response time) dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota Tahun N dikali 100%</p> <p>Tipe Perhitungan :</p> <p>Kumulatif</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Satpol PP Kab. Sragen</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan budaya Baca dan Literasi	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja dinas dalam memfasilitasi dan mendorong minat baca pemustaka ke perpustakaan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah pengunjung tahun ini – <u>jumlah pengunjung tahun lalu</u>) X 100 % jumlah pengunjung tahun lalu</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Perpusnas</p>
2.	meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan	persentase pengunjung perpustakaan per tahun	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja dinas dalam meningkatkan Jumlah Pengunjung ke perpustakaan</p> <p>Formulasi Pengukuran: <u>Jumlah pengunjung perpustakaan</u> X 100 % Jumlah populasi yang harus dilayani</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</p>
		Jumlah koleksi pustaka	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja dinas dalam Menambah Jumlah Bahan Pustaka di Perpustakaan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah Koleksi Bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan (Eksemplar)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</p>
3.	Menyelenggarakan kearsipan daerah	Indeks Kearsipan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja dinas dalam tata kelola arsip</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal 60% + hasil penilaian pengawasan kearsipan internal (Peraturan Arsip Nasional No. 6 th 2019 tentang pengawasan kearsipan)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Peraturan Arsip Nasional No. 6 th 2019 tentang pengawasan kearsipan</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
4.	Terkelolanya arsip daerah dengan baik	% perangkat daerah yang telah menerapkan arsip baku	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam memfasilitasi dan mendorong penerapan arsip baku di Kabupaten Sragen.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml PD yang menerapkan arsip}}{\text{Jml PD secara keseluruhan}} \times 100\%$ </p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Fungsi :
- Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.;
 - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja daerah	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih agar dapat diukur kinerja perencanaan pembangunan dengan melihat kualitas dokumen perencanaan pembangunan. Formulasi Pengukuran : Perolehan nilai perencanaan kinerja pada hasil evaluasi atas AKIP dari Kemenpan dan RB tahun n-1 Tipe Perhitungan : Non komulatif Sumber Data : Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun n-1 dari Kemenpan dan RB.
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	% kualitas perencanaan % kualitas perencanaan kinerja tahunan	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih agar terjaga kualitas dan implementasi antara dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan. Formulasi Pengukuran : % kualitas perencanaan strategis : % pemenuhan, kualitas dan implementasi rencana strategis. % kualitas perencanaan kinerja tahunan : % pemenuhan, kualitas dan implementasi rencana kerja tahunan. Tipe Perhitungan: Non komulatif Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
2.	Mengoptimalkan perangkat daerah untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan daya saing daerah	Indeks inovasi daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih agar dapat diukur tingkat kematangan inovasi daerah berdasarkan periode tertentu</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $ISP = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$ $\text{rata - rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=17}^{26} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i \text{ Inovasi ke } j}{n}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n : Jumlah inovasi daerah suatu Pemda - i : nomor indikator - j : nomor inovasi - ISP : Indikator satuan Pemda - ISI : Indikator satuan inovasi <p>Penghitungan indeks inovasi daerah : Indeks inovasi daerah = $\frac{\text{Skor total}}{\text{Skor total maksimum}} \times 100$</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skor total maksimum adalah 250 - Skala IID adalah 0 s.d. 100 <p>Dengan proporsi aspek : Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan skor jumlah inovasi dan satuan inovasi daerah sebesar 60%</p> <p>Tipe Perhitungan : Non komulatif</p> <p>Sumber Data : Keputusan Mendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun n.</p>
3.	Meningkatnya riset dan inovasi daerah yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan dan daya saing daerah.	% riset dan inovasi yang diimplementasikan	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih karena peningkatan implementasi riset dan inovasi sangat mendukung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan dan daya saing daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\% \text{ riset \& pengembangan yang ditinjau} + \% \text{ inovasi daerah yang ditinjau}}{2}$ <p>Tipe Perhitungan : Non Komulatif</p> <p>Sumber Data : Hasil olah data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang kepegawaian
 - d. Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang efisien melalui manajemen talenta dan pelaksanaan sistem merit	Indeks Sistem Merit	<p>Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur dan membangun sumber daya manusia aparatur dan aparatur sipil negara melalui manajemen talenta dan pelaksanaan sistem merit yang merupakan pendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{(\sum \text{skor} \times \text{bobot setiap aspek})}{(\text{skor maksimal} \times \text{bobot setiap aspek})}$</p> <p>Dasar: Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam dalam manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Komisi Aparatur Sipil Negara</p>
2.	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Alasan Pemilihan Indikator: IP ASN merupakan instrumen untuk mengukur efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan: $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$</p> <p>Dimana: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin W_{1j} = Bobot Sub Dimensi Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Sub Dimensi Kualifikasi ke-j W_{2k} = Bobot Sub Dimensi Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Sub Dimensi Kompetensi ke-k W_{3l} = Bobot Sub Dimensi Kinerja ke-l * Rating Jawaban Sub Dimensi Kinerja ke-l W_{4m} = Bobot Sub Dimensi Disiplin ke-m * Rating Jawaban Sub Dimensi Disiplin ke-m</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara</p>

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Fungsi :
- Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang keuangan;
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang keuangan;
 - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang keuangan;
 - Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1	Meningkatkan persentase PAD serta pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien	1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi</p> <p>Formulasi Pengukuran : Realisasi PAD/Total Pendapatan Daerah dikalikan 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>Sumber Data : BPKPD Kabupaten Sragen</p>
		2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya mewujudkan laporan keuangan daerah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian Kabupaten Sragen guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi</p> <p>Formulasi Pengukuran : Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah pada tahun bersangkutan dengan peringkat sbb: 1. Tingkat I opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Tingkat II opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3. Tingkat III opini Tidak Wajar 4. Tingkat IV opini tidak memberikan pendapat (disclaimer)</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Komulatif</p> <p>Sumber Data : Hasil Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan</p>
1.1	Meningkatnya pendapatan asli daerah	1	<p>Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan (n)} - \text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (n-1)}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun lalu (n-1)}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>Sumber Data : BPKPD Kabupaten Sragen</p>

1.2	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	1.	Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yang baik (%)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya mewujudkan tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yang baik guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi</p> <p>Formulasi Pengukuran : Formulasi Pengukuran : {Laporan keuangan lengkap (40%) + bukti dukung yang dibutuhkan lengkap (30%) + standar umum yang telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja (15%) + Laporan keuangan sesuai prinsip yang berlaku umum (15%)}</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>Sumber Data : BPKPD Kabupaten Sragen</p>
-----	---	----	---	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tugas : Membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

- Fungsi :
- a. Pengoordinasian yang dilaksanakan melalui koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. Pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. Pelaksanaan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	<p>Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya menurunkan resiko bencana di wilayah Kabupaten Sragen guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.</p> <p>Formulasi Pengukuran : Upaya yang sudah dilakukan untuk menurunkan resiko bencana daerah (Aplikasi/ Penilaian Mandiri).</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : BPBD Kabupaten Sragen</p>
2.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	% warga negara yang memperoleh layanan informasi , edukasi, pencegahan dan penanganan bencana	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Masih tingginya potensi bencana di wilayah rawan bencana Kabupaten Sragen</p> <p>Formulasi Pengukuran : $60\% \times \sum$ Persentase Program Penanggulangan</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : BPBD Kabupaten Sragen</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah.

- Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan administrasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Menjamin kondusifitas wilayah Kabupaten Sragen	Prosentase penurunan konflik ipoleksosbud	Alasan Pemilihan Indikator : Masih tingginya potensi konflik di wilayah Kabupaten Sragen Formulasi Pengukuran : Jumlah kejadian konflik tahun berjalan Tipe Penghitungan : Non kumulatif Sumber Data : Bakesbangpol
2.	Terciptanya kondusifitas wilayah Kabupaten Sragen	Prosentase konflik ipoleksosbud yang tertangani	Alasan Pemilihan Indikator : Masih tingginya potensi konflik ipoleksosbud di wilayah Kabupaten Sragen Formulasi Pengukuran : Jumlah kejadian konflik SARA tahun berjalan Tipe Penghitungan : Non kumulatif Sumber Data : Bakesbangpol

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN

Tugas : Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi : a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:

- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, meliputi:
- 1) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - 3) mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - 4) melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan
2.	Meningkatnya kinerja kecamatan	Predikat LKjIP	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Formulasi Pengukuran : Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. Sumber Data : Kecamatan



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

